



KEMENTERIAN PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI

Jalan Jenderal Sudirman, Senayan, Jakarta 10270
Telepon (021) 5711144
Laman www.kemdikbud.go.id

Nomor : 20554/A5/HK.08/2023 23 JUNI 2023
Lampiran : Satu berkas
Hal : Penyampaian Salinan Keputusan Menteri Pendidikan,
Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 179/P/2022 tentang
Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di
Bidang Pendidikan Tahun 2023

- Yth. 1. Sekretaris Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
2. Inspektur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
3. Semua Direktur Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
4. Semua Kepala Badan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
5. Sekretaris Inspektorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
6. Semua Sekretaris Direktorat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
7. Semua Sekretaris Badan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
8. Semua Kepala Biro, Sekretariat Jenderal Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
9. Semua Kepala Pusat di lingkungan Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi;
10. Semua Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan;
11. Semua Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan; dan
12. Yang bersangkutan.

Berkenaan dengan telah ditetapkannya Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 179/P/2023 tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan Tahun 2023 dengan hormat bersama ini kami sampaikan Salinan Keputusan tersebut untuk dipergunakan sebagaimana mestinya.

Atas perhatian dan kerja sama yang baik, kami ucapkan terima kasih.

Kepala Biro Hukum,



Ineko Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN

KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA
NOMOR 179/P/2023
TENTANG
KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN
DI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : a. bahwa untuk mempercepat pelaksanaan pencegahan dan penanganan kekerasan meliputi perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi di lingkungan pendidikan, perlu membentuk kelompok kerja;
- b. bahwa berdasarkan pertimbangan sebagaimana dimaksud dalam huruf a, perlu menetapkan Keputusan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi tentang Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan Tahun 2023;
- Mengingat : 1. Undang-Undang Nomor 7 Tahun 1984 tentang Pengesahan Konvensi mengenai Penghapusan Segala Bentuk Diskriminasi terhadap Wanita (*Convention on the Elimination of All Forms of Discrimination Against Women*) (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 1999 Nomor 165, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 3886);
2. Undang-Undang Nomor 39 Tahun 1999 tentang Hak Asasi Manusia (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
3. Undang-Undang Nomor 20 Tahun 2003 tentang Sistem Pendidikan Nasional (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2003 Nomor 78, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 4301);
4. Undang-Undang Nomor 5 Tahun 2014 tentang Aparatur Sipil Negara (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2014 Nomor 6, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5494);
5. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 23,

- Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5105) sebagaimana telah diubah dengan Peraturan Pemerintah Nomor 66 Tahun 2010 tentang Perubahan Atas Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2010 tentang Pengelolaan dan Penyelenggaraan Pendidikan (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2010 Nomor 112, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 5157);
6. Peraturan Pemerintah Nomor 49 Tahun 2018 tentang Manajemen Pegawai Pemerintah dengan Perjanjian Kerja (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2018 Nomor 224, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6264);
 7. Peraturan Pemerintah Nomor 17 Tahun 2020 tentang Perubahan atas Peraturan Pemerintah Nomor 11 Tahun 2017 tentang Manajemen Pegawai Negeri Sipil (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2020 Nomor 68, Tambahan Lembaran Negara Republik Indonesia Nomor 6477);
 8. Peraturan Presiden Nomor 7 Tahun 2021 tentang Rencana Aksi Nasional Pencegahan dan Penanggulangan Ekstremisme Berbasis Kekerasan yang Mengarah pada Terorisme Tahun 2020 - 2024 (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 9);
 9. Peraturan Presiden Nomor 62 Tahun 2021 tentang Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Lembaran Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 156);
 10. Peraturan Menteri Pendidikan dan Kebudayaan Nomor 82 Tahun 2015 tentang Pencegahan dan Penanggulangan Tindak Kekerasan di Lingkungan Satuan Pendidikan (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2016 Nomor 101);
 11. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 28 Tahun 2021 tentang Organisasi dan Tata Kerja Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 963);
 12. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Nomor 30 Tahun 2021 tentang Pencegahan dan Penanganan Kekerasan Seksual di Perguruan Tinggi (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2021 Nomor 1000);
 13. Peraturan Menteri Pendidikan, Kebudayaan, Riset dan Teknologi Nomor 50 Tahun 2022 tentang Pakaian Seragam Sekolah bagi Peserta Didik Jenjang Pendidikan Dasar dan Pendidikan Menengah (Berita Negara Republik Indonesia Tahun 2022 Nomor 893);

MEMUTUSKAN:

Menetapkan : KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN, RISET, DAN TEKNOLOGI TENTANG KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN PENANGANAN KEKERASAN DI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2023.

KESATU : Menetapkan Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan Tahun 2023 yang selanjutnya disebut Pokja Kekerasan dan Sekretariat Kelompok Kerja Pencegahan dan Penanganan Kekerasan di Bidang Pendidikan yang selanjutnya disebut Sekretariat Pokja Kekerasan dengan susunan keanggotaan sebagaimana tercantum dalam Lampiran yang merupakan bagian tidak terpisahkan dari Keputusan Menteri ini.

KEDUA : Pokja Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU terdiri atas:

1. ketua;
2. sekretariat;
3. sub pokja, terdiri atas:
 - a. bidang pencegahan; dan
 - b. bidang penanganan.
4. koordinator jenjang pendidikan, terdiri atas:
 - a. koordinator guru dan tenaga kependidikan;
 - b. koordinator pendidikan anak usia dini;
 - c. koordinator sekolah dasar;
 - d. koordinator sekolah menengah pertama;
 - e. koordinator sekolah menengah atas;
 - f. koordinator pendidikan masyarakat dan pendidikan khusus; dan
 - g. koordinator pembelajaran dan kemahasiswaan.
5. koordinator wilayah, terdiri atas:
 - a. Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi untuk satuan pendidikan tinggi; dan
 - b. Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan atau Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan untuk satuan pendidikan dasar dan menengah.

KETIGA : Pokja Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KEDUA bertugas:

- a. merencanakan program pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;
- b. melaksanakan program pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi;
- c. melaksanakan pemantauan dan evaluasi terhadap program pencegahan dan penanganan perundungan, kekerasan seksual, dan intoleransi; dan
- d. melakukan pengembangan berkelanjutan dari hasil pemantauan dan evaluasi.

- KEEMPAT : Sekretariat Pokja Kekerasan sebagaimana dimaksud dalam Diktum KESATU bertugas membantu Pokja Kekerasan dalam melaksanakan tugasnya sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA.
- KELIMA : Pokja Kekerasan dan Sekretariat Pokja Kekerasan melaksanakan tugas sebagaimana dimaksud dalam Diktum KETIGA dan Diktum KEEMPAT sejak bulan Januari 2023 s.d. Desember 2023.
- KEENAM : Biaya yang timbul sebagai akibat dari pelaksanaan Keputusan Menteri ini dibebankan pada anggaran Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi Tahun 2023 yang relevan.
- KETUJUH : Keputusan Menteri ini mulai berlaku pada tanggal ditetapkan dan mempunyai daya berlaku surut sejak Januari 2023.

Ditetapkan di Jakarta
Pada tanggal 22 Juni 2023

MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
REPUBLIK INDONESIA,

TTD.

NADIEM ANWAR MAKARIM

Salinan sesuai dengan aslinya.
Kepala Biro Hukum
Kementerian Pendidikan, Kebudayaan, Riset, dan Teknologi,



Ineke Indraswati
NIP 197809262000122001

SALINAN
LAMPIRAN
KEPUTUSAN MENTERI PENDIDIKAN, KEBUDAYAAN,
RISET, DAN TEKNOLOGI
NOMOR 179/P/2023
TENTANG KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI BIDANG PENDIDIKAN
TAHUN 2023

SUSUNAN KEANGGOTAAN KELOMPOK KERJA PENCEGAHAN DAN
PENANGANAN KEKERASAN DI BIDANG PENDIDIKAN TAHUN 2023

| NO. | JABATAN STRUKTURAL | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM | TUGAS |
|---------------------------------------|---|----------------------|-------------------|--|
| A. | Inspektur Jenderal | Inspektorat Jenderal | Ketua Pokja | <ol style="list-style-type: none">mengoordinasikan seluruh koordinator dan Sekretariat Pokja Kekerasan;melaporkan implementasi program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan kepada Menteri; danbertanggung jawab terhadap keberhasilan pelaksanaan program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan. |
| B. SEKRETARIAT POKJA KEKERASAN | | | | |
| 1. | Sekretaris Inspektorat Jenderal | Inspektorat Jenderal | Ketua | <ol style="list-style-type: none">mengoordinasikan seluruh pekerjaan kesekretariatan yang mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan; danmengelola sistem informasi dan pelaporan pada aplikasi <i>Whistle Blowing System</i> (https://wbs.kemdikbud.go.id/) dan LAPOR! (https://kemdikbud.lapor.go.id/). |
| 2. | Kepala Bagian Pengolahan Laporan Pengawasan | Inspektorat Jenderal | Wakil Ketua | |
| 3. | Kepala Bagian Tata Usaha | Inspektorat Jenderal | Sekretaris | |
| 4. | Widyasta Puraardi Pinem | Inspektorat Jenderal | Anggota | |
| 5. | Rindias Helenamartha Fatmasari | Inspektorat Jenderal | Anggota | |
| 6. | Aris Maulana | Inspektorat Jenderal | Anggota | |
| 7. | Moch Bambang S. | Inspektorat Jenderal | Anggota | |

| NO. | JABATAN STRUKTURAL | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM | TUGAS |
|--------------|---|------------------------------------|-------------------|--|
| 8. | M. Derry Dhanovan | Inspektorat Jenderal | Anggota | |
| 9. | Hegar Sandy Pradana | Inspektorat Jenderal | Anggota | |
| 10. | Reza Satria W. | Inspektorat Jenderal | Anggota | |
| 11. | Yanti Supriyani | Inspektorat Jenderal | Anggota | |
| C. SUB POKJA | | | | |
| I | PENCEGAHAN | | | |
| 1. | Kepala Pusat Penguatan Karakter | Pusat Penguatan Karakter | Ketua | mengoordinasikan seluruh pekerjaan Sub Pokja Pencegahan yang mendukung program pencegahan kekerasan di bidang pendidikan. |
| 2. | Ketua Tim Layanan Penguatan Karakter Iklim Keamanan Satuan Pendidikan | Pusat Penguatan Karakter | Wakil Ketua | membantu ketua dalam mengoordinasikan seluruh pekerjaan Sub Pokja Pencegahan yang mendukung program pencegahan kekerasan di bidang pendidikan. |
| a. | ISU PERUNDUNGAN | | | |
| 1. | Ketua Sub Tim Perundungan | Pusat Penguatan Karakter | Koordinator | mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait isu perundungan dalam program pencegahan kekerasan di bidang pendidikan. |
| 2. | Sylvana Maria | Komisi Perlindungan Anak Indonesia | Anggota | |
| 3. | Ali Aulia Ramly | UNICEF Indonesia | Anggota | |
| 4. | Fatimah Asri Mutmainnah | Komisi Nasional Disabilitas | | |
| 5. | Rudi Miswanto | Pusat Penguatan Karakter | Anggota | |
| 6. | Diah Kas Budiarti | Pusat Penguatan Karakter | Anggota | |
| 7. | Lany Fitriana | Pusat Penguatan Karakter | Anggota | |

| NO. | JABATAN STRUKTURAL | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM | TUGAS |
|--------------------------|---------------------------------------|--|-------------------|---|
| 8. | Muhamad Aris Setiaji | Pusat Penguatan Karakter | Anggota | |
| 9. | Siti Jenab | Pusat Penguatan Karakter | Anggota | |
| b. ISU KEKERASAN SEKSUAL | | | | mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait isu kekerasan seksual dalam program pencegahan kekerasan di bidang pendidikan. |
| 1. | Ketua Sub Tim Kekerasan Seksual | Pusat Penguatan Karakter | Koordinator | |
| 2. | Ciput Eka Purwianti | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Anggota | |
| 3. | Anggin Nuzula Rahma | Kementerian Pemberdayaan Perempuan dan Perlindungan Anak | Anggota | |
| 4. | Alimatul Qibtiyah | Komnas Perempuan | Anggota | |
| 5. | Muhammad Ramdan | Lembaga Perlindungan Saksi dan Korban | Anggota | |
| 6. | Indra Budi Setiawan | Pusat Penguatan Karakter | Anggota | |
| 7. | Ryka Hapsari Putri | Pusat Penguatan Karakter | Anggota | |
| 8. | Pebi Sukamdani | Pusat Penguatan Karakter | Anggota | |
| 9. | Septi Herliana Dwi Waluyanti | Pusat Penguatan Karakter | Anggota | |
| c. ISU INTOLERANSI | | | | mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait isu intoleransi dalam program pencegahan kekerasan di bidang pendidikan. |
| 1. | Ketua Sub Tim Intoleransi/Kebhinekaan | Pusat Penguatan Karakter | Koordinator | |
| 2. | Ahmad Fauzi | BNPT | Anggota | |
| 3. | Yuliawan Jamaluddin A | BIN | Anggota | |

| NO. | JABATAN STUKTURAL | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | |
|---------------|-----------------------------|--------------------------|-------------------|-------|---|
| 4. | Suharyanto | Kementerian Dalam Negeri | Anggota | | |
| 5. | Ahmad Hidayatulloh | Kementerian Agama | Anggota | | |
| 6. | Dina Ayu Mirta | Pusat Penguatan Karakter | Anggota | | |
| 7. | E.C. Anom Haryo Bimo Suseto | Pusat Penguatan Karakter | Anggota | | |
| 8. | Dyah Mahesty Wijayanti | Pusat Penguatan Karakter | Anggota | | |
| 9. | R Agung Setyo Wibowo | Pusat Penguatan Karakter | Anggota | | |
| 10. | Yohan Rubiyantoro | Pusat Penguatan Karakter | Anggota | | |
| II PENANGANAN | | | | | |
| 1. | Inspektur Investigasi | Inspektorat Jenderal | Ketua | | mengoordinasikan seluruh pekerjaan Sub Pokja Penanganan yang mendukung program penanganan kekerasan di bidang pendidikan. |
| 2. | Suwardi | Inspektorat Jenderal | Wakil Ketua | | |
| 3. | Nurreka Waty | Inspektorat Jenderal | Anggota | | |
| 4. | Ahmar Hafid | Inspektorat Jenderal | Anggota | | |
| 5. | Nanik Handayani | Inspektorat Jenderal | Anggota | | |
| 6. | Nur Dewi Natrini | Inspektorat Jenderal | Anggota | | |
| 7. | Herliani Corina | Inspektorat Jenderal | Anggota | | |
| 8. | Safrina Ayuning W. | Inspektorat Jenderal | Anggota | | |
| 9. | Raisa | Inspektorat Jenderal | Anggota | | |
| 10. | Vinny Stephanie | Inspektorat Jenderal | Anggota | | |
| 11. | Wahyu Tri Raharjo | Inspektorat Jenderal | Anggota | | |
| 12. | Retnayu Isfandiary | Inspektorat Jenderal | Anggota | | |

| NO. | JABATAN STRUKTURAL | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM | TUGAS |
|--|---------------------|--|--|---|
| 13. | Gannis Eka Pramita | Inspektorat Jenderal | Anggota | |
| 14. | Rachmeilia Dani | Inspektorat Jenderal | Anggota | |
| 15. | Deama Ratna | Inspektorat Jenderal | Anggota | |
| D. KOORDINATOR JENJANG PENDIDIKAN | | | | |
| 1. | Septiana Rahmawati | Sekretariat Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan | Koordinator Guru dan Tenaga Kependidikan | mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Jenderal Guru dan Tenaga Kependidikan dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan. |
| 2. | Beryana Evridawati | Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini | Koordinator Pendidikan Anak Usia Dini | mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Pendidikan Anak Usia Dini dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan. |
| 3. | Weti Yulawati | Direktorat Sekolah Dasar | Koordinator Sekolah Dasar | mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Sekolah Dasar dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan |
| 4. | Nia Nurhasanah | Direktorat Sekolah Menengah Pertama | Koordinator Sekolah Menengah Pertama | mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Sekolah Menengah Pertama dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan. |
| 5. | Fathnuryati Hidayah | Direktorat Sekolah Menengah Atas | Koordinator Sekolah Menengah Atas | mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Sekolah Menengah Atas dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan. |

| NO. | JABATAN STRUKTURAL | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM | TUGAS |
|-------------------------------|---|--|---|---|
| 6. | Rofiuddin | Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus | Koordinator Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus | mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Pendidikan Masyarakat dan Pendidikan Khusus dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan. |
| 7. | Yulita Priyoningsih | Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan | Koordinator Pembelajaran dan Kemahasiswaan | mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Pembelajaran dan Kemahasiswaan dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan. |
| 8. | Dinda Aramitha Wahyu Syafitri | Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan | Koordinator Sekolah Menengah Kejuruan | mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Sekolah Menengah Kejuruan dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan. |
| 9. | Yuni Syam | Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi | Koordinator Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi | mengoordinasikan seluruh pekerjaan terkait Direktorat Akademik Pendidikan Tinggi Vokasi dalam mendukung program pencegahan dan penanganan kekerasan di bidang pendidikan. |
| E. KOORDINATOR WILAYAH | | | | |
| a. | Kepala Lembaga Layanan Pendidikan Tinggi (LLDIKTI) untuk satuan pendidikan tinggi | | | |
| 1. | Kepala LLDIKTI WILAYAH I | LLDIKTI WILAYAH I | Koordinator Wilayah I | mengoordinasikan seluruh pekerjaan di Satuan Pendidikan Jenjang Pendidikan Tinggi dalam mendukung program pencegahan dalam penanganan kekerasan di bidang pendidikan di wilayahnya. |
| 2. | Kepala LLDIKTI WILAYAH II | LLDIKTI WILAYAH II | Koordinator Wilayah II | |
| 3. | Kepala LLDIKTI Kepala WILAYAH III | LLDIKTI WILAYAH III | Koordinator Wilayah III | |
| 4. | Kepala LLDIKTI WILAYAH IV | LLDIKTI WILAYAH IV | Koordinator Wilayah IV | |

| NO. | JABATAN STRUKTURAL | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | |
|-----|--|---------------------------------|--------------------------|-------|---|
| 5. | Kepala LLDIKTI WILAYAH V | LLDIKTI WILAYAH V | Koordinator Wilayah V | | |
| 6. | Kepala LLDIKTI WILAYAH VI | LLDIKTI WILAYAH VI | Koordinator Wilayah VI | | |
| 7. | Kepala LLDIKTI WILAYAH VII | LLDIKTI WILAYAH VII | Koordinator Wilayah VII | | |
| 8. | Kepala LLDIKTI WILAYAH VIII | LLDIKTI WILAYAH VIII | Koordinator Wilayah VIII | | |
| 9. | Kepala LLDIKTI WILAYAH IX | LLDIKTI WILAYAH IX | Koordinator Wilayah IX | | |
| 10. | Kepala LLDIKTI WILAYAH X | LLDIKTI WILAYAH X | Koordinator Wilayah X | | |
| 11. | Kepala LLDIKTI WILAYAH XI | LLDIKTI WILAYAH XI | Koordinator Wilayah XI | | |
| 12. | Kepala LLDIKTI WILAYAH XII | LLDIKTI WILAYAH XII | Koordinator Wilayah XII | | |
| 13. | Kepala LLDIKTI WILAYAH XIII | LLDIKTI WILAYAH XIII | Koordinator Wilayah XIII | | |
| 14. | Kepala LLDIKTI WILAYAH XIV | LLDIKTI WILAYAH XIV | Koordinator Wilayah XIV | | |
| 15. | Kepala LLDIKTI WILAYAH XV | LLDIKTI WILAYAH XV | Koordinator Wilayah XV | | |
| 16. | Kepala LLDIKTI WILAYAH XVI | LLDIKTI WILAYAH XVI | Koordinator Wilayah XVI | | |
| b. | Kepala Balai Besar Penjaminan Mutu Pendidikan (BBPMP) atau Kepala Balai Penjaminan Mutu Pendidikan (BPMP) untuk satuan pendidikan dasar dan menengah | | | | mengoordinasikan seluruh pekerjaan di Satuan Pendidikan Jenjang PAUD, SD, SMP, SMA, dan SLB dalam mendukung program pencegahan dalam penanganan kekerasan di bidang pendidikan di wilayahnya. |
| 1. | Kepala BBPMP Provinsi Sumatera Barat | BBPMP Provinsi Sumatera Barat | Koordinator | | |
| 2. | Kepala BBPMP Provinsi Jawa Barat | BBPMP Provinsi Jawa Barat | Koordinator | | |
| 3. | Kepala BBPMP Provinsi Jawa Tengah | BBPMP Provinsi Jawa Tengah | Koordinator | | |
| 4. | Kepala BBPMP Provinsi Jawa Timur | BBPMP Provinsi Jawa Timur | Koordinator | | |
| 5. | Kepala BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan | BBPMP Provinsi Sulawesi Selatan | Koordinator | | |

| NO. | JABATAN STRUKTURAL | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM | TUGAS |
|-----|--|-----------------------------------|-------------------|-------|
| 6. | Kepala BPMP Provinsi Aceh | BPMP Provinsi Aceh | Koordinator | |
| 7. | Kepala BPMP Provinsi Sumatera Utara | BPMP Provinsi Sumatera Utara | Koordinator | |
| 8. | Kepala BPMP Provinsi Riau | BPMP Provinsi Riau | Koordinator | |
| 9. | Kepala BPMP Provinsi Kepulauan Riau | BPMP Provinsi Kepulauan Riau | Koordinator | |
| 10. | Kepala BPMP Provinsi Jambi | BPMP Provinsi Jambi | Koordinator | |
| 11. | Kepala BPMP Provinsi Bengkulu | BPMP Provinsi Bengkulu | Koordinator | |
| 12. | Kepala BPMP Provinsi Bangka Belitung | BPMP Provinsi Bangka Belitung | Koordinator | |
| 13. | Kepala BPMP Provinsi Sumatera Selatan | BPMP Provinsi Sumatera Selatan | Koordinator | |
| 14. | Kepala BPMP Provinsi Lampung | BPMP Provinsi Lampung | Koordinator | |
| 15. | Kepala BPMP Provinsi Banten | BPMP Provinsi Banten | Koordinator | |
| 16. | Kepala BPMP Provinsi DKI Jakarta | BPMP Provinsi D.K.I. Jakarta | Koordinator | |
| 17. | Kepala BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta | BPMP Provinsi D.I. Yogyakarta | Koordinator | |
| 18. | Kepala BPMP Provinsi Bali | BPMP Provinsi Bali | Koordinator | |
| 19. | Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat | BPMP Provinsi Nusa Tenggara Barat | Koordinator | |
| 20. | Kepala BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur | BPMP Provinsi Nusa Tenggara Timur | Koordinator | |
| 21. | Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Barat | BPMP Provinsi Kalimantan Barat | Koordinator | |
| 22. | Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Tengah | BPMP Provinsi Kalimantan Tengah | Koordinator | |

| NO. | JABATAN STRUKTURAL | INSTANSI | JABATAN DALAM TIM | TUGAS | |
|-----|---|--|-------------------|-------|--|
| 23. | Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Selatan | BPMP Provinsi Kalimantan Selatan | Koordinator | | |
| 24. | Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Timur | BPMP Provinsi Kalimantan Timur | Koordinator | | |
| 25. | Kepala BPMP Provinsi Kalimantan Utara | BPMP Provinsi Kalimantan Utara | Koordinator | | |
| 26. | Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara | BPMP Provinsi Sulawesi Tenggara | Koordinator | | |
| 27. | Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Utara | BPMP Provinsi Sulawesi Utara | Koordinator | | |
| 28. | Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Tengah | BPMP Provinsi Sulawesi Tengah | Koordinator | | |
| 29. | Kepala BPMP Provinsi Sulawesi Barat | BPMP Provinsi Sulawesi Barat | Koordinator | | |
| 30. | Kepala BPMP Provinsi Gorontalo | BPMP Provinsi Gorontalo | Koordinator | | |
| 31. | Kepala BPMP Provinsi Maluku | BPMP Provinsi Maluku | Koordinator | | |
| 32. | Kepala BPMP Provinsi Maluku Utara | BPMP Provinsi Maluku Utara | Koordinator | | |
| 33. | Kepala BPMP Provinsi Papua | BPMP Provinsi Papua | Koordinator | | |
| 34. | Kepala BPMP Provinsi Papua Barat | BPMP Provinsi Papua Barat | Koordinator | | |
| 35. | Kepala BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri | BBPPMPV Bidang Mesin dan Teknik Industri | Koordinator | | mengoordinasikan seluruh pekerjaan di Satuan Pendidikan Jenjang SMK dalam mendukung program pencegahan dalam penanganan kekerasan di bidang pendidikan di wilayahnya |
| 36. | Kepala BBPPMPV Bidang Seni dan Budaya | BBPPMPV Bidang Seni dan Budaya | Koordinator | | |
| 37. | Kepala BBPPMPV Bidang Bangunan dan Listrik | BBPPMPV Bidang | Koordinator | | |